I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan penyalur aspirasi masyarakat, salah satu partai politik di negara Indonesia yang dapat dikatakan sebagai partai politik yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi adalah Partai Nasional Demokrat (selanjutnya disebut Partai Nasdem). Partai Nasdem ialah partai yang dibentuk sebagai alat perjuangan agar demokrasi di Indonesia menemukan sejatinya dan bukan sekedar praktik formal prosedural semata, tetapi demokrasi yang berujung pada kesejahteraan rakyat (http://www.kompasiana.com/post/politik/2013/01/23/road-to-2014-partai-nasional-demokrat-nasdem/ diakses pada 14 April 2015 pada pukul 09.56 WIB)

"Pada awal berdirinya Partai Nasdem menyita perhatian publik karena tingkat infrastruktur partainya yang sudah mencapai 100 persen cabang di tingkat kecamatan seluruh Indonesia, dari sisi finansial Partai Nasdem cukup kuat dengan banyaknya kalangan pengusaha yang ikut bergabung, serta sumber daya mobilisasi media yang kuat berkat bergabungnya pemilik MNC Media Harry Tanoesoedibjo yang semakin memperkuat Surya Paloh yang juga sebagai pemilik Media Group. Begitupun kader kader Partai

Nasdem yang didominasi oleh kader-kader muda potensial yang menjadi mesin penggerak yang berperan menghantarkan Partai Nasdem lolos sebagai peserta pemilu tahun 2014. Kondisi ini jelas menjadi salah satu kekuatan Partai Nasdem dalam menghadapi pemilu tahun 2014." (http://www.kompasiana.com/post/politik/2013/01/23/road-to-2014-partai-nasional-demokrat-nasdem/ diakses pada 14 April 2015 pada pukul 09.56 WIB).

Konflik antara Harry Tanoesodibjo dan Surya Paloh berawal saat Surya Paloh berencana merombak kepengurusan Partai. Tidak hanya merombak, Surya Paloh juga berencana mengendalikan partai dengan langsung menjadi ketua umum. Disisi lain Harry Tanoesoedibjo menginginkan pengurus partai tidak perlu dirombak, selama ini komposisi kepengurusan partai menurut Harry Tanoesoedibjo yang didominasi kelompok kader muda membawa perkembangan yang sangat baik bagi Partai Nasdem. Keinginan Surya Paloh untuk menduduki jabatan Ketua umum juga dinilai melanggar AD/ART Partai Nasdem (Iswara, 2013: 115)

Peraturan yang diinginkan dari para petinggi Partai Nasdem adalah keputusan bersama dari hasil rapat dari seluruh pengurus pusat dan wilayah untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua umum Partai Nasdem, namun hasil yang diterima adalah berbeda dimana HT merasakan sakit hati karena keinginan dari HT adalah bukan Surya Paloh untuk menjadi ketua umum Partai Nasdem, dimana hasilnya berbalik dari keinginan yang diinginkan dari HT, yaitu terpilihnya Surya Paloh menjadi ketua umum partai Nasdem. Hal

itu menjadikan HT mundur dari Partai Nasdem dan beralih ke Partai Hanura. Ini juga diikuti oleh beberapa kader yang ada di beberapa wilayah di Indonesia, yang ikut keluar dari Partai Nasdem, dan ada juga yang mengikuti langkah dari HT untuk keluar dari Partai Nasdem dan masuk ke Partai Hanura. Hal ini berakibat hilangnya dukungan dari beberapa kader yang keluar dari Partai Nasdem dan yang masuk ke Partai Hanura.

Setelah HT keluar dari Partai Nasdem, pada tanggal 17 Februari 2013 HT resmi bergabung ke dalam Partai Hanura. Ada banyak hal yang melatarbelakangi bergabungnya HT ke Partai Hanura yaitu antara lain karena HT melihat sosok ketua umum Partai Hanura yakni Wiranto yang dianggap dapat diajak berdiskusi dan memiliki pengendalian diri yang baik. Alasan kedua, HT memilih bergabung dengan Hanura karena memiliki visi dan misi yang sama yang ingin memajukan partai serta memberi kesempatan lebih kepada kalangan muda untuk bisa lebih berperan di dalam partai. Alasan ketiga yang lebih meyakinkan HT masuk bergabung dengan Hanura, partai ini sejak 2009 tidak masuk dalam kelompok koalisi Pemerintah. Sikap Hanura yang konsisten mengambil bagian sebagai oposisi menjadi pertimbangan tersendiri bagi HT. Alasan keempat, Partai Hanura dianggap HT sebagai partai yang bersih. Hingga saat ini, menurut HT tidak ada kader Partai Hanura yang terlibat kasus korupsi. Kemudian alasan kelima, HT memilih masuk Partai Hanura karena melihat soliditas dan kekompakan partai. Wiranto sebagai sosok yang memimpin partai memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat secara internal. Pada Partai Hanura, HT menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai. Ke depannya, Partai Hanura

bersama HT akan fokus pada pengembangan partai (Sumber dari http://www.tempo.com/nasional/2013/02/29/alasan-harytanoe-memilih-Partai-hanura).

Pengunduran diri HT secara langsung maupun tak langsung tentu merugikan Partai Nasdem. Pertama, terkait dengan *image* partai, perpecahan ini akan menyebabkan buruknya citra kekinian (*current image*) Partai Nasdem sebagai partai baru. Selayaknya partai baru dalam pemilu, Partai Nasdem membangun impresi sebagai partai solid dan mengembangkan kebersamaan untuk bertarung melawan kompetitor lain. Bukan sebaliknya, mengembangkan hubungan yang renggang antar sesama pengurus Partai Nasdem itu sendiri. Perpecahan dalam partai sebelum kompetisi akan menyumbang persepsi negatif sekaligus keraguan publik akan kemampuan Partai Nasdem membawa harapan. Kedua, Kerugian bagi Partai Nasdem atas mundurnya HT, akan merugikan momentum politik pemasaran yang sekarang sedang gencar dilakukan Partai Nasdem. Posisi Partai Nasdem ini yang sudah masuk di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kontribusi pengemasan opini publik di berbagai media milik HT. Keuntungan ini tentu tak akan lagi didapat Partai Nasdem. Ketiga, kerugiannya adalah dapat memicu konflik lanjutan di lingkungan internal Partai Nasdem.

Pada perspektif sirkulasi elite, perubahan elite itu selalu menyebabkan perubahan-perubahan lain pada subsistem lainnya. Sangat mungkin, akan banyak anggota partai yang mendukung HT yang kecewa. Mungkin pula Partai Nasdem akan mengalami konflik yang tidak hanya terjadi di *level*

pengurus pusat, tetapi juga di daerah. Hal ini tentu akan sangat berbahaya bagi eksistensi Partai Nasdem karena bisa menjadi katalisator keguncangan di antara pendukung HT dan pendukung Surya Paloh. Misalnya, indikator itu terlihat dari komentar HT saat mengundurkan diri. Salah satu visinya adalah mendukung orang-orang muda untuk menjadi pengurus partai dan dengan "pengambilalihan" eksekutif partai oleh Surya Paloh, hal itu akan berpotensi memicu ketidaksolidan pengurus yang merembet hingga ke daerah. Tentu, mundurnya HT merugikan persiapan Partai Nasdem sebagai partai potensial di pemilu 2014. Elektabilitas sangat mungkin turun drastis dan berpotensi terjadinya pengurangan suara yang signifikan akibat hubungan yang renggang antar elite di dalamnya.

Beberapa daerah yang ada di Pulau Jawa dan daerah lainnya memperlihatkan pengaruh mundurnya HT dari Partai Nasdem ke Partai Hanura, mulai dari yang mengikuti HT ke Partai Hanura sampai keluar dan masuk ke partai lainnya. Hal ini merupakan peristiwa yang merupakan bentuk dari konflik politik yang terjadi di Partai Nasdem yang mengakibatkan mundurnya HT. Keputusan pembekuan DPW Partai Nasdem Sanusi Ramadhan dilatar belakangi oleh tindakan Sanusi Ramadhan yang dianggap mengumpulkan 11 DPW se-Indonesia guna melakukan penolakan terhadap pencalonan Surya Paloh sebagai Ketua Umum, dan pertemuan tersebut digelar di salah satu gedung milik mantan Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem, Harry Tanoesodibjo Para anggota partai yang mengikuti mundurnya HT ke Partai Hanura ataupun partai lainnya banyak dari kalangan muda yang kecewa dengan pengurus Partai Nasdem yang memilih Surya Paloh menjadi ketua

umum dari Partai Nasdem. (http://makassar.tribunnews.com/menyimpang-ketua-dpw-nasdem-sulsel-dinonaktifkan, diakses pada tanggal 14 April 2015 Pukul 11.05 WIB)

Penelitian tentang konflik yang terjadi di partai politik pernah di teliti oleh saudara Andre mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tetapi ia lebih membahas tentang konflik internal yang terjadi dalam partai PDI-P dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mesuji. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: Analisis Implikasi Pengunduran Diri Harry Tanoesodibjo terhadap eksistensi Partai Nasdem dari perspektif pengurus wilayah Provinsi Lampung.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang penulis angkat yaitu "Bagaimana implikasi pengunduran diri Harry Tanoesodibjo terhadap eksistensi Partai Nasdem dari perspektif pengurus wilayah Provinsi Lampung?".

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

a. Mengetahui kronologi pengunduran diri Harry Tanoesodibjo terhadap eksistensi Partai Nasdem
b. Mengetahui implikasi pengunduran diri Harry Tanoesodibjo terhadap eksistensi Partai Nasdem dari perspektif pengurus wilayah Provinsi Lampung

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis penelitian ini meliputi :

   Sebagai pengembangan keilmuan, khususnya pengembangan dasar-dasar ilmu politik yang berhubungan dengan kajian partai politik, terutama dalam kajian tentang sistem kepartaian di indonesia. Selain itu dapat menjadi penambah pengetahuan tentang implikasi pengunduran diri Harry Tanoesodibjo terhadap eksistensi Partai Nasdem dari perspektif pengurus wilayah Provinsi Lampung serta solusi yang akan ditempuh dalam mengatasi akibat dari konflik tersebut.

2. Kegunaan secara praktis dari penelitian ini meliputi :

   Secara praktis sebagai bahan yang dapat dipertimbangkan bagi partai politik dalam menyikapi implikasi pengunduran diri Harry Tanoesodibjo terhadap eksistensi Partai Nasdem.